



Analisis tata kelola keuangan pada gereja kristen indonesia merisi indah

Trice Febrinda Gabriela Mony¹, Dwi Suhartini²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹tricefebrinda@gmail.com , ²dwisuhartini@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 17 Mei 2022

Disetujui 20 Mei 2022

Diterbitkan 25 Mei 2022

Kata kunci:

Tata kelola keuangan;

Transparansi; Akuntabilitas;

Responsibilitas;

Independensi; Kewajaran

dan kesetaraan

Keywords:

Good corporate
governance;

Transparency;

Accountability;

Responsibility;

Independence; Fairness
and equality

ABSTRAK

Tata kelola keuangan perlu diterapkan pada semua organisasi, termasuk organisasi nirlaba khususnya pada organisasi nirlaba keagamaan. Prinsip-prinsip tata kelola keuangan terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola keuangan melalui prinsip-prinsip tata kelola keuangan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Merisi Indah. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip transparansi, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan di GKI Merisi Indah sudah diterapkan dengan sangat baik, sedangkan prinsip akuntabilitas yang dalam penerapannya sudah cukup baik namun masih ada yang harus diperbaiki. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan studi lebih lanjut dalam menentukan apakah tata kelola keuangan di organisasi nirlaba lainnya sudah diterapkan dengan baik atau belum. Oleh karena itu, sangat penting menerapkannya prinsip-prinsip tata kelola keuangan karena dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola keuangan dapat menjadikan Gereja menjadi organisasi nirlaba yang baik dan sehat.

ABSTRACT

Good Corporate Governance need to be applied to all organizations, including non-profit organizations, especially in religious non-profit organizations (Church). The principles of Good Corporate Governance consist of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality. This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance through the principles of Good Corporate Governance in Gereja Kristen Indonesia (GKI) Merisi Indah. The data analysis technique that used in this research is descriptive analysis. The conclusion of this research explained that transparency, responsibility, independence, and fairness and equality principles at GKI Merisi Indah have been implemented very well, but the principle of accountability in its implementation is quite good but there are still things that need to be improved. The results of this research can be used as a source of reference and further researches in determining whether Good Corporate Governance in other non-profit organizations has been implemented properly or not. Therefore, it is recommended to implement the principles of Good Corporate Governance because the implementation of the principles of Good Corporate Governance can make the Church a good and healthy non-profit organization.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dalam segala kegiatannya tidak mencari keuntungan/laba. Organisasi nirlaba membutuhkan bantuan dana dari donatur maupun pemerintah untuk mendanai kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mempertimbangkan bahwa perbedaan dari organisasi nirlaba dengan organisasi laba yaitu dengan cara mendapat sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak menginginkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sepadan dengan jumlah yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Organisasi nirlaba di Indonesia adalah yayasan, lembaga asosiasi, institut, dan organisasi keagamaan. Menurut Maulidiyah & Darno (2019), organisasi nirlaba merupakan organisasi yang sasaran utamanya adalah membantu suatu isu maupun perihal untuk mendapatkan perhatian publik ketika memperoleh tujuan tanpa mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Y. N. Sari & Dewi (2018), organisasi nirlaba merupakan himpunan atau individu yang memiliki tujuan untuk membagikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat yang tidak mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan dalam usahanya.

Organisasi nirlaba perlu menerapkan tata kelola yang baik. Tata kelola organisasi merupakan salah satu hal terpenting yang diperlukan dalam organisasi sehingga dapat membantu organisasi dalam

mengelola organisasi dengan baik agar dapat mencapai visi dan misi yang telah dibuat bersama. Namun seiring berjalannya waktu, selain diterapkan di lingkungan perusahaan, tata kelola juga diperlukan dan sudah banyak diterapkan di lingkungan organisasi sektor publik termasuk organisasi nirlaba.

Sektiono & Nugraheni (2017) menyatakan bahwa tata kelola yang baik dianggap paling mudah dalam lingkungan pemerintahan dan korporasi. Namun saat ini organisasi nirlaba juga diharuskan untuk menjadi organisasi yang kompeten dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip *good governance*. Untoro (2010) mengungkapkan bahwa terdapat tiga dimensi yang dapat menilai suatu organisasi, yaitu dimensi lingkungan di mana terapat faktor eksternal dalam organisasi, dimensi transaksional yang adalah hubungan organisasi dengan lingkungan, dan dimensi organisasional yang merupakan proses dalam organisasi. Dengan pendekatan dimensional, selain sinonim dengan lembaga pemerintahan, organisasi sektor publik juga meliputi yayasan, organisasi partai politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya termasuk organisasi peribadatan Halim & Kusufi (2014:442)

Gereja merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba, tempat di mana para umat Kristiani melaksanakan kegiatan peribadatannya. Gereja bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan Gereja dalam bentuk laporan keuangan kepada pemerintah dan Jemaatnya. Laporan keuangan Gereja harus dibuat secara berkala untuk kepentingan Jemaat, karena sumber pemasukkan Gereja berasal dari uang persembahan syukur yang adalah pendapatan utama Gereja yang bersumber dari Jemaat. Selain persembahan syukur, terdapat juga sumbangan dari donatur yang membantu dalam pembiayaan kegiatan Gereja. Persembahan serta sumbangan yang diterima Gereja memiliki jumlah yang besar. Maka dari itu, diperlukan tata kelola keuangan yang baik agar informasi penerimaan dan penggunaan yang tersaji di dalam laporan keuangan dapat tersampaikan kepada Jemaat dan donatur dengan baik.

Ada beberapa kasus korupsi yang terjadi terkait kurang baiknya pengelolaan keuangan Gereja. Kasus pertama yaitu adanya dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja yang menelan anggaran sekitar Rp160 miliar dan melibatkan pihak-pihak tertentu (Suparman, 2020). Kasus kedua yaitu adanya penyelewengan anggaran sebesar Rp8 miliar lebih dimulai tahun 2016-2020 oleh eks bendahara klasis dan eks pembantu bendahara (Siwalima, 2021). Kasus ketiga yaitu adanya dana hibah yang digelontorkan Pemkab Bengkayang pada tahun 2016 dan 2019 untuk pembangunan Gereja yang totalnya mencapai lebih dari Rp4 miliar (Prima & Zain, 2021). Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak Gereja yang masih memiliki kelemahan dibidang pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang diterapkan masih kurang efektif dan efisien sehingga perlu diperbaiki. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada beberapa Gereja yang sudah menerapkan tata kelola yang baik dan harus dipertahankan serta ditingkatkan menjadi lebih baik lagi keefektifan dan keefisiennya. Oleh karena itu, tata kelola keuangan di Gereja perlu ditelaah untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti kasus-kasus di atas.

Beberapa penelitian terdahulu hanya meneliti prinsip transparansi dan/atau akuntabilitas. Seperti penelitian Widyasari et al. (2021), di mana hasil penelitian menjelaskan bahwa banyak anggota komunitas yang belum memahami transparansi keuangan dengan penyusunan anggaran. Kemudian penelitian dari Arofah & Rahmawati (2017), Hermanto et al. (2021), dan Sari et al. (2018) menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik walaupun hanya dilakukan secara sederhana dalam hal pencatatan laporan keuangannya. Namun berbeda dengan penelitian Gozali (2021), di mana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Ikhlas Manna sudah berjalan dengan baik.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tata kelola keuangan melalui prinsip-prinsip tata kelola yang terdiri transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan di GKI Merisi Indah. Harapan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi tata kelola keuangan pada GKI Merisi Indah, sebagai kontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang tata kelola keuangan pada organisasi nirlaba khususnya keagamaan, serta dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi tata kelola keuangan GKI Merisi Indah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari *Good Corporate*

Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara kepada informan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Pendeta, Bendahara, dan Jemaat GKI Merisi Indah. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, melewati tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Transparansi pada GKI Merisi Indah

Penyampaian informasi secara jujur dan terbuka terhadap pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan merupakan bentuk dari prinsip transparansi. Sebagai organisasi keagamaan, gereja dituntut untuk terbuka dalam segala keputusan yang ada terhadap jemaat dan pihak berkepentingan lainnya. Prinsip transparansi di GKI Merisi Indah ditunjukkan melalui adanya Persidangan Majelis Jemaat (PMJ), Persidangan Majelis Jemaat Diperluas (PMJD), dan informasi lainnya yang dimuat pada Warta Jemaat. Hal ini dijelaskan oleh Pendeta Gunadi mengenai PMJ bahwa:

“Kalau berkaitan dengan transparansi, hampir semua keputusan harus transparan. Karena kalau sebuah keputusan yang ada di dalam perjalanan gereja itu biasanya diputuskan dalam rapat Namanya Persidangan Majelis Jemaat (PMJ). Di rapat itu segala hal yang berkaitan dengan program-program rutin maupun nonrutin dibahas. Kalau dalam Tata Gereja, kalau tidak ada hal yang bersifat pribadi itu sebenarnya bisa dihadiri oleh jemaat.”

Selain itu, Pendeta Erlinda S. Zebua juga menambahkan bahwa:

“Kalau sebelum pandemi, onsite, di kantor depan. Ketika pandemic itu online, dan sempat berhenti. Waktu itu kita masih belajar Zoom, 2 bulan kayaknya. Kita baru mulai itu April kalau tidak salah. Selama 2 bulan itu kita rapatnya via Whatsapp, Chat di grup Majelis Jemaat (MJ).”

Perihal Persidangan Majelis Jemaat Diperluas (PMJD), Pendeta Erlinda S. Zebua menjelaskan bahwa:

“GKI Merisi Indah terbuka sekali untuk anggota. Dulu sebelum pandemi, tiap 3 bulan bendahara presentasi berapa pengeluaran. Orang asing sebenarnya juga bisa melihat apalagi jemaat sendiri bahkan bendahara selalu bilang kalau ada yang kurang jelas bisa bertemu bendahara setelah kebaktian untuk bertanya begitu. Lalu tiap tahun ada Persidangan Majelis Jemaat Diperluas (PMJD), ketika itu laporan keuangannya dibagi dan biasanya sesinya lumayan panjang. Ditanyain macam-macam, biasanya yang tidak terlapor di warta itu, kan Merisi ada banyak donatur yang tidak mau disebutkan, tapi akan muncul di laporan akhir tahun di PMJD. Bahkan keuangan ini dilaporkan juga ke Klasis dan Sinode Wilayah. Setiap Klasis ada pelawatan dan pemeriksaan laporan keuangan juga setiap tahun. Jadi nanti sudah diaudit di internal, lalu dikritisi di PMJD dengan jemaat yang hadir, nanti sama Klasis dikritisi lagi.”

“Sebelum pandemi, onsite, di ruang kebaktian setelah kebaktian selesai. Banyak masukkan-masukkan dari Jemaat, Cuma memang karena formatnya siding/rapat, memang kurang diminati. Kalau pandemi, yang tahun lalu online. Ga terlalu ya karna orang-orang juga bingung. Waktu itu pernah ditanyain Pak Gunadi tapi tidak ada yang menjawab.”

Salah satu jemaat GKI Merisi Indah, Saudari Natasia Tjahjadi, juga menjelaskan pendapatnya bahwa:

“Menurut aku sih sudah baik. Soalnya warta jemaat kan media umum, semua orang bisa akses. Dan berapa yang diterima hari itu dilaporkan langsung. memang kalau laporan pengeluaran dalam arti mau dipake untuk apa kan memang sepertinya 3 bulanan sekali, itu kalau tidak salah yang laporan Majelis Jemaat (MJ). Tetapi aku rasa setiap jemaat kalau ada pertanyaan, kapanpun mau tanya juga bisa. Dari dua hal ini aku rasa transparansi itu sudah bisa disanggupi. Cuman karena aku bukan

jemaat yang kepo, basic-nya aku percaya siapapun pengelola sudah oke. Jadi karena data itu sudah disampaikan di media umum, akui rasa transparansi itu mestinya sudah iya menurut aku.”

Sebelum pandemi, Persidangan Majelis Jemaat (PMJ) dilaksanakan di kantor Gereja. Namun ketika pandemi, PMJ sempat terhenti selama kurang lebih dua bulan semenjak *lockdown*. Pada saat itu Majelis Jemaat (MJ) sempat mencoba rapat melalui grup MJ di aplikasi *Whatsapp*, dan juga mempelajari penggunaan aplikasi *Zoom*. Kemudian rapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Zoom* hingga saat ini.

Adapun persidangan lainnya yaitu Persidangan Majelis Jemaat Diperluas (PMJD), di mana jemaat diperkenankan hadir untuk memberikan masukan-masukkan sebagai evaluasi kinerja Majelis Jemaat serta badan pelayanan lainnya dalam setahun. Sebelum dilaksanakannya PMJD, Majelis Jemaat akan mengundang jemaat dan membagikan Buku Kehidupan Jemaat (BKJ) kepada jemaat yang berisi program-program kerja Majelis Jemaat dan badan pelayanan lainnya yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir. Tujuan dibuatnya BKJ ini untuk mengevaluasi kinerja Majelis Jemaat dan badan pelayanan di setiap tahunnya, serta memberikan masukan-masukkan yang bersifat membangun agar visi dan misi yang telah direncanakan dapat menjadi sebuah realita yang diperlukan bagi peningkatan kinerja pelayanan di tahun-tahun yang mendatang.

Sebelum pandemi, PMJD dilaksanakan di ruang kebaktian setelah kebaktian selesai. Jemaat banyak memberikan masukan untuk mengevaluasi namun yang hadir hanya beberapa orang diluar Majelis Jemaat dan badan pelayanan lainnya. Ketika pandemi, dilakukan secara daring melalui aplikasi *Zoom*, dan kehadiran jemaat juga berkurang.

Selain itu, informasi mengenai kegiatan dalam sepekan maupun program-program gereja lainnya serta informasi keuangan mengenai pemasukkan dan pengeluaran gereja dicantumkan ke dalam Warta Jemaat yang diperbaharui setiap minggunya. Warta Jemaat berbentuk buku yang disediakan setiap hari Minggu. Baik sebelum maupun selama pandemi, Warta Jemaat juga tersedia dalam bentuk *file PDF* yang dibagikan oleh Komisi Literatur melalui aplikasi *Whatsapp*.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi di GKI Merisi Indah sudah baik. Dari pembahasan implementasi prinsip transparansi di GKI Merisi Indah, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Arofah & Rahmawati (2017) dan Hermanto et al. (2021) yang menunjukkan bahwa organisasi nirlaba (gereja) sudah menerapkan transparansi dengan baik.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada GKI Merisi Indah

Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki pemasukkan dan pengeluaran, selain prinsip transparansi, gereja juga dituntut untuk melaporkan keuangannya secara akuntabel. Prinsip akuntabilitas di GKI Merisi Indah ditunjukkan melalui adanya pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan gereja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Sinode. Berikut penjelasan dari Saudari Julianti selaku salah satu bendahara yang menjabat pada periode sebelum pandemi:

“Laporan keuangannya kayaknya ini, itu kan sudah sesuai standarnya laporan keuangan Klasis. Kayaknya sama ya sampai nanti Klasis atau Sinode merubah. Soalnya kita juga setiap tahun pelawatan dari Klasis, poinnya juga tentang keuangan jadi pasti ditinjau. Selama ini belum ada perubahan ya, kita masih mengikuti ketentuan dari Klasis.”

“Bentuk laporan keuangan GKI Merisi dari sebelum tahun 2019 hanya sebatas Penerimaan dan Pengeluaran aja. Seperti yang sampai sekarang dilaporkan saat PMJD kemarin. Nah sejak tahun 2019, BPMK Klasis Banyuwangi mengeluarkan standar LK gereja lingkup Klasis Banyuwangi yang diperlukan saat ada pelawatan MJ Klasis. Jadi tiap tahun setiap gereja di lingkup Klasis Banyuwangi dilawat/dikunjungi oleh BPMK. Untuk memudahkan, dibuat standarisasi LK yang terdiri dari: 1. Lap arus kas, 2. Lap Posisi Keuangan, 3. Lap Aktivitas Keuangan, 4. CALK (Penerimaan dan Beban Operasional), boleh ditambahi: 5. Catatan Arus Kas.”

“Kalau LK yang diterbitkan gereja untuk dilaporkan PMJD hanya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran aja, mungkin ditambahi arus kas dan rincian penerimaan serta rincian pengeluaran. Nah kenapa kadang lapiran tahun 2019 ada

di 2020 gak ada, karena di tahun-tahun itu karna baru pertama kali membuat LK lengkap jadi masih mencari-cari bentuk lampiran yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi kadang di 2019 ada, di 2020 dirasa bisa ditiadakan.”

“Oiya, rincian pengeluaran kita selama ini hanya diklasifikasikan berdasarkan: biaya umum, aktivitas komisi, panitia semester, titipan, dll. Sedangkan format biaya/pengeluaran yang diminta Klasis diklasifikasikan ke dalam 6 jenis kegiatan: 1. Lyturgia (kebaktian); 2. Koinonia (persekutuan); 3. Kerygma (pengajaran); 4. Diakonia (pelayanan); 5 matyria (kesaksian); dan 6 kepemimpinan.”

“Titipan untuk tahun 2019 dan 2020 terdiri dari titipan tabungan PS Nafiri (yg tetap dan belum diambil sampai tahun ini), dan titipan masuk-keluar aja, missal: donasi untuk pandemi yg disalurkan/dikeluarkan ke jemaat/simpatian yang membutuhkan. Kemudian missal ada juga persembahan untuk korban bencana alam, dan persembahan-persembahan lainnya yang intinya gereja hanya ditipti sementara aja, nantinya akan dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya. Di tahun 2021 nanti jumlah titipan akan bertambah drastis karna ada pos pengadaan rumah emiritasi pendeta Gunadi.”

Berikut penjelasan pengelolaan keuangan dari Bapak Ronald, selaku bendahara yang menjabat saat pendemi:

“Kalau pengeluaran rutin sama seperti biasa, ada operasional (gaji), biaya utilitas (air, listrik, telpon), internet. Kalau sekarang itu, apalagi kondisi pandemi internet itu semakin krusial, menjadi satu hal yg utama. Kalau tahun 2019, internet itu mungkin tidak dianggarkan, cuma tambahan aja. Sekarang itu sejak tahun lalu itu sudah mulai dianggarkan khusus karna kita kan mau live streaming, jadi diadakan untuk yg operasional seperti pulsa atau langganan kuota maupun juga sarananya seperti kamera, komputer dan lainnya. Itu juga anggaran yg sebenarnya khusus tadinya ya tapi sekarang jadi anggaran umum. Selama pandemi karna kita jarang kegiatan ya di gereja sehingga dikasih potongan dari pemerintah untuk biaya operasional PLN. Tapi sejak tahun ini sudah normal sih tarifnya.”

“Kalau untuk khususnya kita ada proyek untuk rumah emiritasi, itu juga fokus kita sampai tahun iini karna tahun depan sudah pelaksanaannya. Kita juga ada anggaran khusus untuk bantuan bagi jemaat yang terdampak covid. Memang yang memutuskan survei gitu ya, khususnya bapak ibu pendeta yang lebih tau kondisi langsung. Mereka yang merekomendasikan nanti diputuskan bersama-sama bahwa kita akan memberikan kepada mereka yang membutuhkan dan dicatat. Jadi berupa tunai dan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhan seperti diakonia (makanan dll) itu memang sudah ada ya, termasuk dalam kebutuhan rutin tadi.”

“Pemasukkan kita terutama pasti dari persembahan. Karna kita bukan Lembaga profit, jadi kita benar-benar mengandalkan jemaat yang memberikan donasi atau sumbangan dan persembahan dalam ibadah minggu maupun ibadah ucapan syukur. Nah itu ada macam-macam, yg rutin itu setiap hari minggu, ada juga siapa yg punya rejeki dia akan memberikan persembahan khusus gitu ya. Kalo sebelum pandemi polanya biasanya memberikan dengan memasukkan ke dalam kantong atau dalam kotak persembahan. Nah yg menjadi perubahan sejak pandemi adalah sekarang sudah berubah menjadi online. Memberikan persembahan dari transfer atau QR code BCA yang kita sudah bekerja sama.”

“Kalau setelah pandemi, karna kondisinya hampir 70% lewat transfer semua, kebetulan tugasku untuk merekap karna rekening gereja cuma satu jadi disitu ada semua pemasukkan pengeluaran yang mungkin data konfidensial sehingga yg mengakses hanya bendahara. Jadi aku tiap awal minggu, Senin sama Rabu merekap, kemudian dimasukkan dalam laporan pada hari Kamis untuk laporan hari Minggu sebelumnya. Saat pandemi, masih ada yang memberikan persembahan dalam amplop, setelah ibadah itu langsung hitung yang di dalam kotak atau kantong itu dan fisiknya langsung dibawa. Seninnya kalau secara teknis disetorkan lalu Senin

malamnya langsung ku rekap semua yg disetor pagi dan ditransfer dari dari Kamis sebelumnya dalam minggu itu.”

“Auditor independen itu harus diluar MJ dan diluar bendahara tentunya. Jadi tidak terlibat di dalam keuangan-keuangan selama ini, jadi harus melihat secara obyektif. Dan kebetulan di jemaat kita ada beberapa orang yang capable untuk bisa mengaudit itu. Audit ini memang untuk jemaat, karna kan semua bersumber dari jemaat sehingga ini yan mau kita transparansikan kepada jemaat. Bentuknya seperti yg setiap minggu di warta jemaat dan pengumuman ada catatan persembahan masuk gitu ya, tapi kalau dari program ada sistem laporan setiap 3 bulanan untuk bagaimana pengelolaan kita, jadi laporan realisasi anggaran, persembahan yang masuk dipakainya sesuai atau engga, itu yg sebenarnya kita laporkan. Tapi memang sejak pandemi ini belum lagi ada karna kita terbatas. Kemudian di dalam laporan tahunan pada bulan April itu akan ada evaluasi PMJD, karna lebih terbuka dan bisa didiskusikan, laporan keuangan dalam setahun juga dibagikan. Dan hasil audit dari tim audit akan disampaikan dalam PMJD. Nah dari situ nanti keliatan apa ada yg mau ditanya lebih lanjut atau kurang jelas, mau kasih masukkan-masukkan gitu ya.”

Standarisasi laporan keuangan yang dibuat oleh GKI Merisi indah ditentukan oleh Badan Pelayanan Majelis Klasis (BPMK) dalam lingkup Klasis Banyuwangi, yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, dan ditambah Catatan Arus Kas. Dari standarisasi ini, peneliti menganalisa bahwa standarisasi laporan keuangan GKI Merisi Indah mengacu pada PSAK 45 dan disesuaikan dengan keperluan di GKI Merisi indah.

Pada tahun 2019, GKI Merisi Indah baru menggunakan standar laporan keuangan ini dikarenakan sebelum tahun 2019 laporan keuangan yang dibuat hanya sebatas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran saja, seperti yang dilaporkan pada saat PMJD. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran serta tambahan yaitu Laporan arus kas dan Rincian Penerimaan dan Pengeluaran ini juga diterbitkan untuk gereja.

Selain laporan keuangan, terdapat juga beberapa kertas kerja yang mengikuti kebutuhan gereja, seperti Rekap Penerimaan, Klasisifikasi dari Keseluruhan, Klasifikasi dari Komisi, Klasifikasi Biaya Umum, dan Bidang-Bidang, Rekap Pengeluaran, Rincian Titipan, Lampiran-Lampiran, serta Aset Gereja, sehingga bentuknya tidak baku dan jika dirasa tidak diperlukan maka dapat dihilangkan. Rincian Pengeluaran yang dibuat oleh Bendahara gereja hanya dikelompokkan berdasarkan Biaya Umum, Aktivitas Komisi, Panitia Semester, Titipan, dan lain-lain. Sedangkan format yang diminta Klasis dikelompokkan ke dalam enam jenis kegiatan, yaitu Liturgia (Kebaktian), Koinonia (Persekutuan), Kerygma (Pengajaran), Diakonia (Pelayanan), Martyria (Kesaksian), dan Kepemimpinan. Berikut ini adalah contoh laporan keuangan GKI Merisi Indah pada tahun 2019.

GKI MERISI INDAH - LAPORAN KEUANGAN				
TAHUN 2018/2019				
ARUS KAS				
	2019		2018	
Penerimaan	Rp	-	Rp	-
Beban Operasional	Rp	-	Rp	-
Penerimaan titipan	Rp	-	Rp	-
Pengeluaran titipan	Rp	-	Rp	-
Operasional - net	Rp	-	Rp	-
Pembelian inventaris: laptop, dll	Rp	-	Rp	-
Pembangunan/setor ke rek. PPRK	Rp	-	Rp	-
Investasi - net	Rp	-	Rp	-
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas	Rp	-	Rp	-
Saldo awal kas dan setara kas	Rp	-	Rp	-
Saldo akhir kas dan setara kas	Rp	-	Rp	-

Gambar 3 Laporan Arus Kas GKI Merisi Indah 2019

GKI MERISI INDAH - LAPORAN KEUANGAN						
TAHUN 2019						
CATATAN ARUS KAS						
	Kas		Bank		Jumlah	
Saldo awal tahun 2019	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Penerimaan :						
Kolekte/Persembahan Kantong	Rp	-			Rp	-
Persembahan Sampul	Rp	-			Rp	-
Pengembangan gereja	Rp	-			Rp	-
Hari raya gerejawi, syukur akhir tahun	Rp	-			Rp	-
Celengan	Rp	-			Rp	-
Beasiswa, Bapel2	Rp	-			Rp	-
Penikahan, PK Keliling, PD Sektor	Rp	-			Rp	-
Sampul persembahan Majelis Jemaat	Rp	-			Rp	-
Lain2 + prsmbhn buka-tutup PMSW ke-69	Rp	-			Rp	-
Titipan	Rp	-			Rp	-
Setoran kas ke bank			Rp	-	Rp	-
Pengeluaran						
JKH, gaji karyawan, THR, BPJS	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sekretariat, viaticum, dll (umum)	Rp	-			Rp	-
TJBJ			Rp	-	Rp	-
Bapel, Panter, Diakonia	Rp	-			Rp	-
Sarpras	Rp	-			Rp	-
Lain2			Rp	-	Rp	-
Pemb.inventaris			Rp	-	Rp	-
Pembangunan/setor ke rek. PPRK			Rp	-	Rp	-
Setoran kas ke bank	Rp	-			Rp	-
Titipan			Rp	-	Rp	-
Saldo akhir tahun 2019	Rp	-	Rp	-	Rp	-

Gambar 4 Catatan Arus Kas GKI Merisi Indah 2019

GKI MERISI INDAH - LAPORAN KEUANGAN		
TAHUN 2018/2019		
RINCIAN PENERIMAAN		
	2019	2018
Persembahan Kebaktian Umum	Rp -	Rp -
Persembahan Kebaktian Remaja	Rp -	Rp -
Persembahan Kebaktian Anak	Rp -	Rp -
Persembahan Bulanan/Perpuluhan	Rp -	Rp -
Persembahan Khusus/Uc.Syukur	Rp -	Rp -
Pengembangan Gereja	Rp -	Rp -
Hari Raya Besar Gerejawi	Rp -	Rp -
Persembahan Celengan	Rp -	Rp -
Persembahan Syukur Akhir Tahun	Rp -	Rp -
Pendidikan/Beasiswa	Rp -	Rp -
Bapel: KP - persmb.PD Pemuda-Remaja	Rp -	Rp -
Bapel: KD - bunga mimbar & penj.kue	Rp -	Rp -
Pernikahan	Rp -	Rp -
Perjamuan Kudus Keliling	Rp -	Rp -
Persekutuan Doa Sektor, PD lain-lain	Rp -	Rp -
Sampul Persembahan Majelis Jemaat	Rp -	Rp -
Persembhn.Keb.Buka-Tutup PMSW ke-69	Rp -	Rp -
Lain-Lain	Rp -	Rp -
J U M L A H	-	-
	#DIV/0!	
Lain2: sumbangan2 dlm bentuk uang dan barang, bunga bank		
selisih ada di titipan = 98,641,469 (lihat rincian titipan tahun 2019)		

Gambar 5 CaLK Penerimaan GKI Merisi Indah 2019

GKI MERISI INDAH - LAPORAN KEUANGAN			
TAHUN 2018/2019			
BEBAN OPERASIONAL			
No.	K E T E R A N G A N	2019	2018
1	Liturgia (Ibadah)	Rp -	Rp -
2	Koinonia (Persekutuan)	Rp -	Rp -
3	Kerygma (Pengajaran)	Rp -	Rp -
4	Diakonia		Rp -
	a. Diakonia Internal	Rp -	
	b. Diakonia Eksternal	Rp -	
5	Martyria (Kesaksian)	Rp -	Rp -
6	Kepemimpinan	Rp -	Rp -
7	Sarana dan Prasarana (PLN, PDAM, Kend., Telp, perbaikan/service, dll)	Rp -	Rp -
8	TJBJ	Rp -	Rp -
9	Sekretariat (ATK, dll), gaji, JKH, THR, BPJS, Kes	Rp -	Rp -
10	Lain-lain (pajak bunga, iuran rmh emeritasi, iuran PGIS)	Rp -	Rp -
	TOTAL BEBAN OPERASIONAL	Rp -	Rp -
11	Pembelian Inventaris	Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Gambar 6 CaLK Beban Operasional GKI Merisi Indah 2019

Dalam laporan keuangan pada tahun 2019-2021, terdapat persamaan dan perbedaan dengan PSAK 45. Pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas GKI Merisi Indah sudah sesuai dengan PSAK 45. Namun dalam laporan aktivitas keuangan, penerimaan dan beban operasional keuangan gereja hanya tercatat jumlah keseluruhannya, sedangkan penerimaan dan beban operasional yang dicatat secara rinci dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sehingga terdapat CaLK Penerimaan dan CaLK Beban Operasional dalam laporan keuangan GKI Merisi Indah. Selain itu, CaLK Penerimaan dan CaLK Beban Operasional dicatat secara sederhana, sedangkan yang secara rinci tercatat pada kertas kerja Rincian/Rekap Penerimaan dan Rincian/Rekap Pengeluaran. Hal ini menjadikan banyaknya kertas kerja yang ada dalam laporan keuangan di GKI Merisi Indah. Kemudian catatan arus kas pada laporan keuangan gereja digunakan untuk pelaporan pada saat PMJD.

Laporan keuangan lainnya yaitu kertas kerja yang berisikan tentang pengeluaran yang dikelompokkan dalam Klasifikasi Keseluruhan, Klasifikasi Komisi-Komisi dan Panitia, Klasifikasi Umu, Rincian Titipan, Lampiran, dan Aset Gereja. Kertas kerja klasifikasi ini secara keseluruhan memiliki isi yang sama, hanya saja dikelompokkan sesuai dengan kesesuaiannya. Tujuan dibuat kertas kerja klasifikasi ini untuk memudahkan Majelis Jemaat, Jemaat, serta pihak berkepentingan lainnya dalam membaca laporan keuangan.

Selain itu, laporan keuangan pada tahun 2019-2022 terdapat sedikit perbedaan dalam mencatat akun-akun pengeluaran dan pemasukkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019-2020 awal belum pandemic sehingga masih tercatat seperti biasa, sedangkan pada tahun 2020 pertengahan hingga tahun 2021 sudah berada dalam kondisi pandemi.

Pengeluaran dibagi menjadi dua, ada pengeluaran rutin dan nonrutin. Pengeluaran terdapat akun beban operasional seperti gaji karyawan, biaya utilitas seperti telepon, listrik, dan air, kebutuhan diakonia seperti makanan, minuman, dan lain-lain, serta pengeluaran yang dianggarkan Komisi-Komisi setiap tahunnya. Selama pandemi, pengeluaran listrik sedikit menurun dikarenakan gedung gereja dan rumah komisi jarang digunakan karena tidak ada kegiatan, sehingga biaya listrik gereja diberi potongan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2021 sudah kembali normal tarif yang diberikan semenjak PPKM. Sedangkan pengeluaran nonrutin yaitu pada tahun 2019 masih tersisa sedikit mengenai penyelesaiannya laporan Pembangunan Rumah Komisi dan di tahun 2021 hingga saat ini ada pengeluaran untuk Rumah Emiritasi Pendeta Gunadi.

Pada tahun 2019, internet termasuk dalam pengeluaran nonrutin karena belum terlalu dibutuhkan dan tidak dianggarkan. Namun pada tahun 2020, internet dimasukkan ke dalam pengeluaran rutin dikarenakan adanya pandemi, yang mana Majelis Jemaat memutuskan untuk mengadakan Kebaktian *Live Streaming*, sehingga saran seperti Kamera, Laptop, dan lain-lain juga dianggarkan. Selain itu, terdapat anggaran khusus yaitu bantuan bagi jemaat yang terdampak Covid-19. Pendeta akan melakukan survei terhadap jemaat yang memang membutuhkan dan merekomendasikan lalu diputuskan bersama oleh Majelis Jemaat. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan sesuai dengan kebutuhan jemaat.

Pemasukkan gereja juga dibagi menjadi dua, yaitu pemasukkan rutin dan nonrutin. Pemasukkan rutin yang mana pemasukkan utama gereja adalah Persembahan, sedangkan pemasukkan nonrutin/khusus yaitu sumbangan serta perpuluhan jemaat. Sebelum pandemic, persembahan diberikan setiap hari Minggu yang dimasukkan ke dalam kantong atau kotak persembahan. Ketika pandemi, persembahan dan pemasukkan lainnya diberikan secara *online*, yaitu melalui transfer ke Bank BCA atau melalui *scan QR* yang disediakan gereja. Namun GKI Merisi Indah masih menerima persembahan berupa tunai yang dikumpul dan akan diberikan ketika kebaktian gereja diadakan melalui kotak persembahan bagi jemaat yang tidak bisa menggunakan *scan QR* maupun transfer ke bank.

Kondisi pandemi menjadikan semua aktivitas pemasukkan dan pengeluaran gereja beralih menjadi transfer bank. Namun GKI Merisi Indah hanya memiliki satu rekening, dan yang dapat mengakses rekening tersebut hanya bendahara. Bendahara sendiri terdiri dari dua orang, yang mana terdapat pembagian tugas dalam tim bendahara di GKI Merisi Indah, yaitu ada yang dibagikan pengecekan dan perekapan mutasi rekening serta melaporkan, ada juga yang dibagikan pencatatan laporan keuangan. Selain itu, nota dan kuitansi juga direkap dan disimpan oleh bendahara sesuai dengan standar peraturan keuangan BPMK.

Selain dihitung dan dicatat, laporan keuangan gereja juga perlu diperiksa kesesuaiannya. Dalam melakukan audit pengelolaan keuangan gereja, terdapat tim audit internal yang berasal dari jemaat GKI Merisi Indah, yang memiliki kapabilitas dalam mengaudit keuangannya bukan merupakan bagian dari

Majelis Jemaat agar dapat diaudit secara obyektif. Hasil dari audit akan diumumkan melalui PMJD setiap tahunnya, di mana tim audit internal juga harus menyampaikan hasil audit keuangan gereja pada saat itu. Selain itu, akan ada pelawatan atau kunjungan dari BPKM untuk meninjau bagaimana pengelolaan keuangan di GKI Merisi Indah.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas pada GKI Merisi Indah sudah cukup baik walaupun laporan keuangannya masih mengacu pada PSAK 45. Dari pembahasan implementasi prinsip akuntabilitas di GKI Merisi Indah, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sari et al. (2018) dan Gozali (2021) yang menunjukkan bahwa organisasi nirlaba (gereja) sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik.

Implementasi Prinsip Responsibilitas pada GKI Merisi Indah

Gereja memiliki tanggung jawab baik terhadap jemaat maupun lingkungan sekitar dan masyarakat. Dalam prinsip ini gereja lebih ditekankan pada tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan wawancara, Pendeta Gunadi menjelaskan bahwa:

“Kalau bicara soal program gereja, ada bagian yang berkaitan dengan kemasyarakatan, hampir di setiap tahun itu mesti ada program, bahkan sebenarnya maunya kalau boleh sampai sekian persen dari anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di sekeliling gereja supaya mereka bisa merasakan kehadiran gereja. Dan yang kedua, juga memperhatikan kelompok-kelompok yang memang butuh perhatian lebih, misalnya panti asuhan, panti werdha, bahkan ada program melayani mereka yang ada di Lembaga kemasyarakatan, LP. Kita mempunyai program setiap tahun ada 4 kali donor darah bersama dengan masyarakat di mana di dalam program itu kita memfasilitasi dengan menyiapkan sekedar konsumsi, lalu bahkan menyiapkan mungkin penyemangat bagi mereka yang berdonor dengan adanya memberikan doorprize dan segala macam sehingga pendonor darah dibagian RW kita itu bisa ambil bagian dalam program donor darah, bekerja sama dengan PMI dan pihak RW.”

Salah satu jemaat dan ketua Komisi Beasiswa GKI Merisi Indah, Ibu Rebeka, juga memberikan pendapatnya bahwa:

“Di sini aku lihat kegiatan kemasyarakatannya bagus, yang pertama itu yang bisa konsisten itu donor darah ya. Itu menurut aku sangat baik sekali bisa kerja sama dengan RW di sini bahkan rutin ya. Ada juga program-program yang dibuat oleh panitia, itu kan sebuah bentuk perhatian ya ke lingkungan sekitar walaupun memang tidak rutin. Tapi paling tidak aku liat sih ada model-model berbagi ke panti asuhan, terus pernah juga untuk satpam, tukang sayur, itu sih.”

“Kalau di Komisi Beasiswa sejauh ini gaada kesulitan, memang kemarin aja sih. Selama covid jadi ga bisa ketemu dengan si anak langsung ya untuk memberikan bantuan dana itu. Selama ini kan memang diberikannya kalau kita ada pertemuan ya, pokoknya satu bulan tuh pasti ketemu gitu ya. Nah setelah covid sampai dengan saat ini akhirnya tidak, jadi ya hanya kita memberikan ditransfer gitu. Tapi kita tetap ada pertemuan secara online, tetap berusaha supaya tidak hilang, tetap memberikan kegiatan.”

GKI Merisi Indah memiliki komisi-komisi yang setiap tahunnya mengadakan program-program kerja yaitu mengajak lingkungan sekitar gereja untuk berpartisipasi serta kegiatan untuk berbagi kepada masyarakat luas. Dalam wawancara dan data sekunder yang peneliti temukan, berikut ini adalah program-program kerja GKI Merisi Indah yang tercatat dalam Buku Kehidupan Jemaat (BKJ) tahun 2019 dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat:

- **Komisi Pemuda**
We Share Together, memberikan perhatian kasih dengan saudara dari agama lain dengan cara membagikan takjil secara berkelompok di lokasi yang sudah ditentukan. (Kegiatan nonrutin).
- **Komisi Dewasa**
Bakti Sosial Badan Kerjasama Wanita Kristen-Katolik Indonesia (BKWKI), pemberian sembako kepada tukang becak, tukang sapu jalan, dan orang tidak mampu. (Kegiatan nonrutin).

- Komisi Kesaksian dan Pelayanan
 - Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 Surabaya di Porong, (Kegiatan rutin).
 - Pemeriksaan Mata (Katarak) Gratis, (Kegiatan rutin).
 - Memfasilitasi Screening Ulang dan Operasi Katarak Gratis, (Kegiatan rutin).
 - Pemeriksaan Gula Darah Gratis di Balai RW X Bendul Merisi, (Kegiatan rutin).
 - Bakti Sosial Donor Darah, (Kegiatan rutin).
- Komisi Beasiswa
 - Pemberian Beasiswa, (Kegiatan rutin).
 - Kelas Bahasa Inggris, (Kegiatan rutin).

Mulai bulan Maret 2020, GKI Merisi Indah memutuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan gereja secara *online* sesuai himbauan dari pemerintah. Hal ini berdampak kepada program kerja komisi-komisi, baik rutin maupun nonrutin, yang mengharuskan tatap muka menjadi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2021, beberapa program kerja, baik rutin maupun nonrutin, juga masih tidak dapat terlaksana. Adapun program-program kerja yang dilakukan berubah menjadi *online*.

Berdasarkan wawancara dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip responsibilitas di GKI Merisi Indah sudah baik. Namun belum ada penelitian yang mendukung hasil penelitian dalam prinsip ini.

Implementasi Prinsip Independensi pada GKI Merisi Indah

Dalam menjalankan prinsip independensi, gereja harus dikelola secara independen. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan tidak adanya pendominasian dalam jabatan dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Berikut merupakan penjelasan dari Pendeta Erlinda:

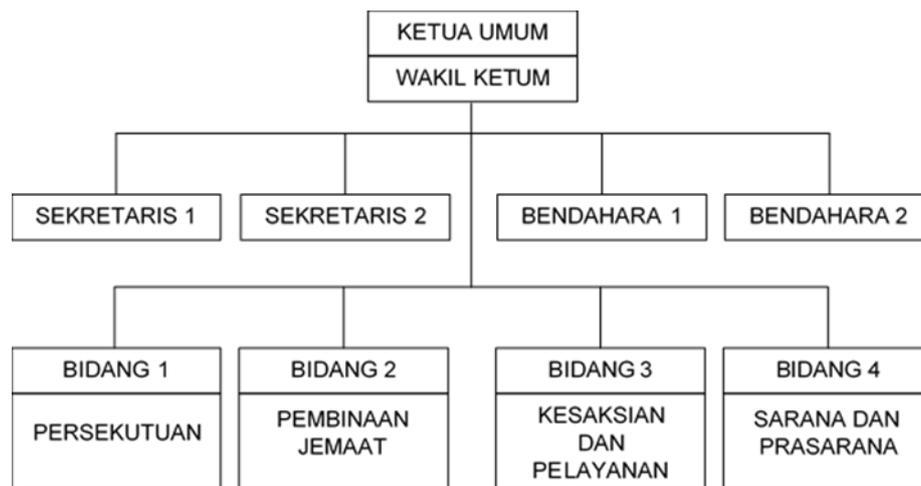
“Jadi kakak-adik, suami-istri, mertua-menantu di Tata Gereja tidak boleh menjabat bersama, karena satu suara di MJ kalau voting sangat menentukan. Misalnya ada keputusan penting, kan tidak boleh ada tendensi, takutnya tidak netral suaranya jadi tidak bisa ambil keputusan sendiri. Karena gereja itu persidangan dan rapat itu adalah cara mencari kehendak Tuhan, itu prinsipnya sebenarnya.”

“Pembentukan MJ setiap tahun kita minta ke jemaat untuk memberi nama lalu didoakan di PMJ lalu dikunjungi. Yang bersedia kemudian diteguhkan menjadi penatua. Masa jabatan itu tiga tahun, diperpanjang lagi menjadi enam tahun. Dulu masih boleh diperpanjang tapi ada peraturan baru secara sinodal, harus turun dulu satu tahun baru nanti dimulai dari nol lagi kalau dicalonkan kembali.”

“Ketua, sekretaris, dan bendahara dipilih berdasarkan yang bisa melakukan tugasnya, tidak ada senioritas atau apa. Kita punya 4 bidang. Bidang 1 urusan kebaktian, persekutuan Namanya. Bidang 2 urusan pembinaan, komisi anak, pemiuda, remaja, dll. Bidang 3 urusan kesaksian dan pelayanan, keluar gereja. Bidang 4 sarpras dan kekaryawanan.”

Berdasarkan Tata Gereja GKI Pasal XX tentang Jabatan Gerejawi, salah satu syarat untuk menjabat sebagai Majelis Jemaat adalah tidak mempunyai hubungan orang tua-anak, mertua-menantu, suami-istri, dan saudara sekandung dengan pejabat gerejawi dari jemaat yang sama hal ini dibuktikan dari wawancara bahwa praktiknya jemaat yang menjadi Penatua tidak memiliki hubungan keluarga satu sama lain.

Berdasarkan Struktur dan Pedoman Pelayanan Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) memiliki susunan sebagai berikut:



Gambar 7 Bagan Struktur Kemajelis GKI Merisi Indah

Berdasarkan gambar 7 Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan Ketua-Ketua Bidang yang setiap bidangnya memiliki anggota bidang. Masa jabatan BPMJ adalah satu tahun.

Selain itu, Majelis Jemaat (MJ) juga memiliki masa jabatan. Masa jabatan MJ yaitu tiga tahun dan dapat diperpanjang maksimal sampai dengan tiga tahun. Kemudian dapat menjabat kembali dengan syarat yaitu turun dari jabatan selama satu tahun, agar dapat dicalonkan kembali. Setiap tahun MJ akan mengumumkan kepada jemaat untuk menyarankan nama-nama anggota jemaat yang sekiranya dapat menjadi Penatua, kemudian jika orang tersebut bersedia makan akan diteguhkan menjadi Penatua (Majelis Jemaat). Baik sebelum maupun selama pandemi, pelaksanaannya masih sama.

Berdasarkan wawancara dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip independensi di GKI Merisi Indah sudah baik. Dari pembahasan dalam implementasi prinsip independensi pada penelitian ini, belum ada penelitian yang mendukung hasil penelitian dalam prinsip ini.

Implementasi Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan pada GKI Merisi Indah

Prinsip kewajaran dan kesetaraan dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan dalam beropini dan hak kepada anggota jemaat untuk mencalonkan diri atau menjadi bagian dalam kepengurusan gereja. Mengenai prinsip ini, Pendeta Gunadi menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya selalu terbuka ya, bahkan di setiap bulan kalau ada rapat pengurus itu selalu dibuka kesempatan untuk ke jemaat yang hendak menyampaikan usulan atau menyampaikan pendapat mengenai sesuatu yang ada di gereja itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa secara formal, menulis surat, bisa menyampaikan secara lisan kepada pengurus, kepada pendeta, kepada siapapun pengurus yang ada sehingga bisa menyampaikan apakah itu berupa keluhan, apakh unek-unek, apakah harapan, itu bisa disampaikan supaya ditindaklanjuti semaksimal yang bisa.”

Menurut pendapat Saudari Natasia Tjahjadi, selaku jemaat GKI Merisi Indah, yaitu:

“Aku tidak tahu secara peraturan atau secara teologis di GKI, aku ngomong secara umum, secara adat dan etika. Di GKI itu tidak mengenal mencalonkan diri, budaya itu tidak ada di GKI. Jadi dibilang apakah ada hak? Iya, karena dibudaya kita tidak ada budaya seperti itu jadi tidak bisa dibilang konteks apakah berhak mencalonkan diri. Bukan dibilang tidak ada, Cuma bukan adatnya, bukan budayanya. Tetapi itu ada itu bukan karena mereka tidak diberi hak itu, bukan. Kalau cari seperti itu bukan di GKI, bukan karena GKI menolak atau menentang orang untuk mencalonkan diri. Tapi karena kita tidak berbudaya itu, jadi lebih ke dipilih atau ditanyakan bersedia atau tidak untuk menjabat kepengurusan atau bapel lainnya.”

Prinsip ini di GKI Merisi Indah ditunjukkan dengan dibukanya kesempatan untuk memberikan pendapat, kritik, saran, serta usulan kepada jemaat. Selain itu, GKI Merisi Indah juga terbuka dalam hal pemberian hak kepada jemaat yang ingin menjadi bagian dalam badan pelayanan gereja. Namun, jemaat di GKI Merisi Indah cenderung untuk tidak mencalonkan diri melainkan dipilih oleh anggota jemaat untuk menjadi Penatuan maupun badan pelayanan lainnya.

Berdasarkan wawancara dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan di GKI Merisi Indah sudah baik. Dari pembahasan dalam implementasi prinsip ini, belum ada penelitian yang mendukung hasil penelitian dalam prinsip ini.

Keterbatasan dan Implikasi

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pihak GKI Merisi Indah tidak memperbolehkan laporan keuangannya dicantumkan secara utuh (nominal angka tidak ditampilkan) dalam skripsi ini. Kemudian wawancara hampir keseluruhan dilakukan secara *online* melalui *Google Meet* dikarenakan adanya PPKM sehingga tidak dapat melakukan wawancara tatap muka.

Ada beberapa implikasi yang peneliti temukan dalam penelitian ini, yaitu sesuai dengan standar laporan keuangan dari Badan Pelayanan Majelis Klasi (BPMK), laporan keuangan GKI Merisi Indah dibagi menjadi lima laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 45, sedangkan standar akuntansi yang berlaku saat ini sudah berganti menjadi ISAK 35. Tidak ada Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Perubahan Aset Neto di laporan keuangan GKI Merisi Indah, yang mana dua laporan ini merupakan bagian dari ISAK 35. Maka dari itu, GKI Merisi Indah harus mengganti standar laporan keuangannya, karena berdasarkan PPSAK 13 tentang Pencabutan PSAK 45, alasan tergantinya yaitu sebagai dampak dari konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang mengakibatkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis industri dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain.

Selain itu, terkait dengan prinsip akuntabilitas, adanya covid-19 menambah jalur pemasukkan gereja yaitu dengan cara transfer bank. Namun GKI Merisi Indah hanya memiliki satu rekening bank sehingga pemasukkan dan pengeluaran bank menjadi satu. Hal ini dapat menyebabkan kerancuan dan kesalahan pencatatan sehingga diperlukan pembukaan beberapa rekening baru yang dikhususkan untuk pengeluaran seperti rekening pengeluaran rutin, rekening pengeluaran nonrutin, dan rekening untuk dana titipan atau lainnya. Rekening-rekening baru ini akan membantu bendahara dalam memilah dana yang diperuntukkan dan memudahkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti gereja yang lain atau organisasi nirlaba keagamaan lainnya karena ada kemungkinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan GKI Merisi Indah, sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut menggunakan perpanjangan pengamatan.

KESIMPULAN

Sebelum maupun ketika pandemi, GKI Merisi Indah sudah transparan dalam memberikan informasi kepada jemaat, baik informasi dari keputusan maupun informasi keuangan gereja. Kemudian sebelum pandemi, pola pemberian persembahan berupa tunai dan kebutuhan internet masih belum diperlukan. Ketika pandemi, pola pemberian persembahan bertambah menjadi tunai dan transfer, serta kebutuhan akan internet menjadi diperlukan dikarenakan adanya Kebaktian *Live Streaming Youtube*. Laporan keuangan GKI Merisi Indah mengikuti standar yang diberikan Badan Pelayanan Majelis Klasis (BPMK) dan kebutuhan gereja yang mengacu pada PSAK 45. Selain itu, sebelum pandemi, GKI Merisi Indah melakukan program kerja untuk lingkungan dan masyarakat dan berjalan lancar. Namun ketika pandemi, program rutin yang diadakan tidak dapat dijalankan dikarenakan program kerja yang dibuat harus tatap muka. Kemudian pada praktiknya baik sebelum maupun ketika pandemi, GKI Merisi Indah sudah menjalankan ketentuan-ketentuan dalam pedoman gerejawi, yaitu tidak mendominasi dan memiliki batas masa jabatan ketika menjabat menjadi Majelis Jemaat. GKI Merisi Indah juga memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menjadi bagian dari badan pelayanan gereja, namun jemaat cenderung untuk tidak mencalonkan diri melainkan dipilih oleh jemaat lainnya untuk menjadi bagian dari badan pelayanan gereja. Jemaat juga memiliki hak untuk berpendapat, memberi kritik serta saran kepada Majelis Jemaat baik secara langsung maupun melalui surat, *e-mail*, maupun *chat* melalui aplikasi *Whatsapp*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, A. A., & Rahmawati, F. (2017). *Tata Kelola Keuangan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (Studi pada SMK Bina Mandiri Surakarta)*.
- Gozali, Y. Y. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al-Ikhlas Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (E. S. Suharsi (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Hermanto, Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). *Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja Gpdi Gloria Malang*. *Cakrawala*.
<https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4659/1857>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*.
- Meriani, M. M., & Wenny, C. D. (2017). *Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Nirlaba Dan Organisasi Profit Oriented*. <https://core.ac.uk/reader/153523710>
- Prima, L., & Zain, M. (2021). *Polisi Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pembangunan Gereja di Bengkayang*. Kumparan Hi!Pontianak. <https://kumparan.com/hipontianak/polisi-usut-dugaan-korupsi-dana-hibah-pembangunan-gereja-di-bengkayang-1vSMFm2PTDS>
- Siwalima. (2021). *Dana Gereja Berujung Pidana*. Siwalima. <https://siwalimanews.com/dana-gereja-berujung-pidana/?amp>
- Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi (Pertama)*. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yhz-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=akuntansi+adalah&ots=OEUhX2BmH7&sig=MbYFihz5mxNleasbvWi33-CXrSI&redir_esc=y#v=onepage&q=akuntansi+adalah&f=true
- Widyasari, Syanti, & Nataherwin. (2021). *Pengembangan Sistem Dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Serta Anggaran Organisasi Nirlaba*. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4, 175–181.